

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Ismi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., Pam=nduan Praktis SABH sistem Administrasi Badan Hukum, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011) Cetakan Pertama, hal 13
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hal. 7
- Harahap, M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 Cetakan Kedua. Hal 174-175
- C.S.T. Kansil, Christine S.T., 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2017*. Jakarta, Rineka Cipta,. Hal. 2
- _____, 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2017*. Jakarta, Rineka Cipta,. Hal. 29 dan 38
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal .7.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, hal. 307.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006), hlm.79-80.
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (jakarta,JALA PERMATA AKSARA,2009) hlm, 385
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) hlm 24.

- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006), hlm 82-83.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT REVIKA ADITAMA,2006), hlm 85
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*,(Jakarta, Sinar Grfika, 2002), hlm 76
- Satjipto Rahardjo,*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press,2006), hlm 135-136.
- adjie, Dr Habib.,2015. *Penafsiran tematik hukum notaris indonesia* , Bandung , PT Refika Aditama. hlm 243
- Andasasmita, Komar, 1984. *Notaris I*, Sumur Bandung, hlm 37
- adjie, Dr Habib.,2015. *Penafsiran tematik hukum notaris indonesia* , Bandung , PT Refika Aditama. hlm 287
- Materi kuliah Dr. H. Habib Adjie.,SH.,M.Hum pada hari sabtu, 17 September 2016
- Soejono Soekamto, 1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6
- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA,2006), hlm 82-83.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT REVIKA ADITAMA,2006), hlm 85.
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*,(Jakarta, Sinar Grfika, 2002), hlm 76
- Satjipto Rahardjo,*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press,2006), hlm 135-136.

- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Andasasmita, Komar, 1984. *Notaris I*, Sumur Bandung, hlm 8-13
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Buku 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
hlm 162.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Admistrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung :PT. Refika Aditama, h.72-74.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada, hlm.229
- Lihat Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL)
- Abdul Ghofur Anshori,2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* ,Yogyakarta:UUI Press, hlm 38-39.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000 *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: Mimbar, hlm 117.
- Abdul Kadir Muhammad, 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 77.
- CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita hlm 116
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc. hlm 153
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, hlm 6.
- Abdul Kadir Muhammad, 1995 *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 79.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan hlm 7.

-----, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc
hlm 23

Mulyoto, 2012. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Yogyakarta ; Cakrawala Penerbit

Adjie Habib, 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung ; PT Refika Aditama

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10Tahun 2007 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M-02-HT.01-10Tahun 2009 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan permohonan

pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, serta penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas

C. JURNAL

Rahmah, Miftahul. 2017. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Keterlambatan Pengajuan Permohonan Persetujuan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dedy Ahmad Wiryadi . 2015. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum.

Hilda sophia. 2015. Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dihubungkan dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris Jo undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan KUHP.

Afifah kunni. 2017. Tanggungjawab dan perlindungan hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya.

D. INTERNET

Panduan Aplikasi Perseroan Terbatas
<http://Panduan.ahu.web.id/doku.php?id=perseroan> terbatas diakses pada tanggal 12 Desember 2017

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 20 september 2017, Pukul 22.01 wib

<https://hukumpress.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-tugas-kewenangan-notaris.html> diakses pada 28 september pukul 6.48 WIB

<http://www.birojasapembuatanpt.com/2014/09/pengertian-akta-notaris.html> diakses pada tanggal 20 september 2017 pukul 22.10 WIB

<https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-Notaris/> di akses pada tanggal 20 Desember 2017

<http://www.informasi ahli.com/2016/04/pengertian-Notaris-dan-etika-profesi-Notaris.html> di akses pada tanggal 20 Desember 2017

<http://www.informasi ahli.com/2016/04/pengertian-Notaris-dan-etika-profesi-Notaris.html> di akses pada tanggal 20 Desember 2017

<https://www.Notarisdanppat.com/hal-hal-yang-dilarang-untuk-Notaris/diakses> pada tanggal 24 Desember 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris diakses pada tanggal 3 januari 2018

Hhtho://www.kemekumham.go.id diakses pada tanggal 13 Januari 2018